

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perbankan syariah memiliki ciri khas yang membedakannya dari sistem perbankan konvensional, yaitu pengelolaan operasional yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Keberadaan perbankan ini menjadi salah satu opsi layanan keuangan yang sesuai syariah bagi masyarakat Indonesia, terutama karena mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Situasi ini memberikan peluang besar bagi pertumbuhan dan perkembangan industri perbankan syariah di tanah air.<sup>1</sup> Bank Syariah sendiri merupakan lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas usahanya sesuai dengan ketentuan syariah, dan secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip syariah dalam konteks ini merujuk pada hukum Islam yang diterapkan dalam kegiatan perbankan, sebagaimana ditetapkan oleh lembaga resmi yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa di bidang syariah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mohammad Yunies Edward dan Aan Zainul Anwar, "Analisis Efisiensi Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2010-2013," *Jurnal JDEB UNISNU Jepara* Volume 12, no. No. 1 (2015): hlm. 100-101.

<sup>2</sup> Pratiwi Angrum, "Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja Keuangan," *Jurnal ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2016): 55-76.

Selain itu juga didasari oleh larangan dalam agama islam untuk meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.<sup>3</sup> Salah satu perbedaan utama antara bank konvensional dan bank syariah adalah adanya sistem pengawasan khusus pada bank syariah, yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara umum dan oleh Dewan Pengawas Syariah secara lebih spesifik. Dewan Syariah Nasional MUI memiliki peran dalam mendorong penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi secara luas, terutama dalam sektor keuangan. Lembaga ini juga bertanggung jawab dalam menetapkan fatwa terkait berbagai aktivitas keuangan, menilai serta mengesahkan produk dan layanan keuangan berbasis syariah, dan memastikan bahwa implementasi fatwa tersebut dilakukan secara konsisten oleh lembaga keuangan syariah.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Sejarah hukum Perbankan Syariah di Indonesia, <https://omperia.wikidot.com>

<sup>4</sup> Andrew Shandy Utama, "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia," *UNES Law Review* 2, no. 3 (2020): 290–298.

**Tabel 1.1 Indikator Utama perbankan Syariah**

<b>Indikator</b>	<b>Jumlah institusi</b>	<b>Jumlah Kantor</b>	<b>Aset</b> (dalam triliun rupiah)	<b>PYD</b> (dalam triliun rupiah)	<b>DPK</b> (dalam triliun rupiah)
Bank Umum Syariah	13	1.967	594,71	368,38	465,93
Unit Usaha Syariah	20	426	274,28	200,06	203,32
Bank pembiayaan Rakyat Syariah	173	693	23,18	17,03	15,27
<b>Jumlah</b>	206	3.086	892,17	585,46	684,52

*Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Snapshot Perbankan Syariah 2023*

Pertumbuhan aset yang dimiliki perbankan syariah meningkat cukup pesat dibandingkan pertumbuhan aset yang dimiliki perbankan konvensional. Hal ini dikarenakan kebijakan atau strategi operasional bank syariah seperti strategi penghimpunan dana, kebijakan penyaluran pembiayaan, penentuan nisbah bagi hasil dan sebagainya menyebabkan tidak sedikit masyarakat yang ingin menikmati fasilitas jasa yang disediakan oleh perbankan syariah sehingga berpengaruh pada aset yang dimiliki oleh perbankan syariah.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Nurani Purboastuti, Nurul Anwar, dan Irma Suryahani, "Pengaruh Indikator Utama Perbankan Terhadap Pangsa Pasar Perbankan Syariah," *Jejak* 8, no. 1 (2015): 13–22.

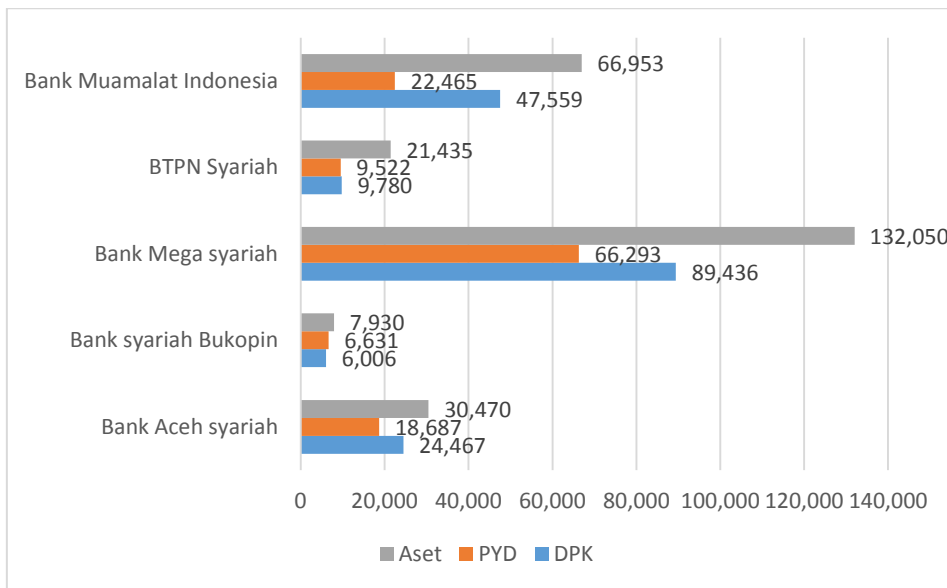
**Tabel 1.2 Perkembangan Aset, PYD, dan DPK pada Bank Bank Umum Syariah**

No	Bank	Indikator	Tahun		
			2021	2022	2023
1	Bank Muamalat Indonesia	Aset	58.899	61.364	66.953
		PYD	18.041	18.222	22.465
		DPK	46.871	46.143	47.559
2	BTPN Syariah	Aset	16.435	21.161	21.435
		PYD	7.277	8.999	9.522
		DPK	8.042	9.446	9.780
3	Bank Mega Syariah	Aset	132.879	141.750	132.050
		PYD	60.677	70.289	66.293
		DPK	98.907	102.950	89.436
4	Bank Bukopin Syariah	Aset	6.220	7.013	7.930
		PYD	4.272	5.168	6.631
		DPK	4.595	5.589	6.006
5	Bank Aceh Syariah	Aset	28.170	28.767	30.470
		PYD	16.345	17.334	18.687
		DPK	24.467	22.976	24.467

*Sumber: Laporan Keuangan Bank Umum Syariah (Otoritas Jasa Keuangan)*

Tabel di atas hanya menyajikan 5 dari total 14 Bank Umum Syariah di Indonesia, karena ketidaklengkapan data yang diperoleh selama 2021-2023 pada Bank tersebut. Maka data di atas atau data tersebut dijadikan rujukan dalam penelitian ini.

**Grafik 1.1 Perkembangan Aset, PYD, DPK Bank Umum Syariah 2023**



Salah satu kegiatan utama dalam operasional perbankan syariah, selain menghimpun dana, menyediakan layanan jasa, dan menjalankan aktivitas sosial, adalah penyaluran pembiayaan. Dalam definisi lainnya, pembiayaan dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan usaha inti bank syariah, yaitu memberikan fasilitas pendanaan guna memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana (defisit unit). Proses ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dengan pihak penerima pembiayaan, di mana pihak yang memperoleh dana memiliki kewajiban untuk mengembalikannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Pengembalian tersebut dapat disertai imbalan berupa upah (upah), tanpa imbalan, atau melalui skema bagi hasil sesuai prinsip syariah.<sup>6</sup>

Dalam mencapai kinerja yang optimal, bank syariah harus memperhatikan produktivitas dan efisiensi mereka dalam mengelola input dan output. Hal ini membantu bank syariah menghasilkan laba yang lebih besar dan memberikan keuntungan yang lebih banyak bagi pemegang saham mereka. Selain itu, peningkatan produktivitas dan efisiensi juga dapat membantu bank syariah memenuhi tuntutan regulasi yang makin ketat. Dengan memaksimalkan penggunaan input mereka dan mengurangi pemborosan, bank syariah dapat mengoptimalkan kinerja mereka dan memenuhi persyaratan regulator dengan lebih efektif.<sup>7</sup>

Kinerja perbankan syariah menunjukkan hasil yang relatif lebih baik dibandingkan dengan perbankan konvensional. Salah satu indikator yang mendukung pernyataan tersebut adalah rendahnya tingkat pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) pada perbankan syariah dibandingkan dengan Non-Performing Loan (NPL) pada bank konvensional.

---

<sup>6</sup> Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Manajemen pembiayaan bank syariah*, (Pekanbaru: Cahaya Pirdaus), 2018.

<sup>7</sup> Aam Slamet Rusydiana, Nisful Laila, dan Sudana Sudana, "Efisiensi dan Produktivitas Industri Perbankan pada Sistem Moneter Ganda di Indonesia," *Jurnal Siasat Bisnis* 23, no. 1 (2019): 50–66.

Efisiensi merupakan salah satu aspek krusial dalam menilai kinerja sebuah bank, yang salah satunya dapat ditingkatkan melalui upaya pengurangan biaya dalam proses operasional.<sup>8</sup> Tingkat efisiensi yang dicapai mencerminkan kualitas kinerja yang optimal. Salah satu metode yang umum digunakan untuk mengukur efisiensi adalah Data Envelopment Analysis (DEA). Metode ini menghitung tingkat efisiensi dari seluruh unit bank syariah yang dianalisis. DEA dirancang secara khusus untuk mengukur efisiensi ketika melibatkan banyak variabel input dan output yang tidak dapat digabungkan secara langsung. Nilai efisiensi yang dihasilkan bersifat relatif, tergantung pada tingkat efisiensi dari masing-masing unit bank syariah dalam kelompok sampel. Selain itu, DEA juga mampu memberikan rekomendasi mengenai faktor-faktor apa saja yang perlu diperbaiki agar efisiensi dapat dicapai secara optimal.<sup>9</sup>

Efisiensi adalah salah satu parameter kinerja keuangan dari bank syariah yang menunjukkan seberapa baik bank syariah dalam mengelola sumber daya serta menentukan faktor-faktor yang tepat dalam mencapai tujuan perusahaan. Berbagai upaya untuk

---

<sup>8</sup> Adrian Sutawijaya dan Etty Puji Lestari, "Efisiensi Teknik Perbankan Indonesia Pascakrisis Ekonomi: Sebuah Studi Empiris Penerapan Model Dea," *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan* 10, no. 1 (2009): 49.

<sup>9</sup> Afif Amirillah, "Efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia" 7, no. 2 (2014): 100–202.

meningkatkan efisiensi dilakukan bank syariah guna menghasilkan lebih banyak pendapatan per unit biaya serta dengan margin yang relatif rendah terhadap nasabah. Oleh karenanya, bagi sebuah bank syariah atau industri perbankan syariah secara keseluruhan, efisiensi merupakan aspek yang sangat penting diperhatikan untuk mewujudkan suatu kinerja keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Efisiensi juga bisa diterjemahkan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar atau di dalam konsep matematika merupakan perhitungan rasio antara keluaran (output) dan masukan (input).<sup>10</sup>

Efisiensi mengacu pada bagaimana baiknya sumber daya digunakan untuk menghasilkan output. Efisiensi dapat dikatakan sebagai penghematan penggunaan sumber daya dalam kegiatan organisasi, dimana efisiensi pada daya guna. Efisiensi yang dimaksudkan adalah pemakaian sumber daya yang lebih sedikit untuk mencapai hasil yang sama. Efisiensi merupakan ukuran yang membandingkan rencana penggunaan masukan (input) dengan realisasi penggunaannya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Jmv Mulyadi, Dwi Prastowo Darminto, dan Mombang Sihite, *Efisiensi Perbankan Dan Perusahaan* (Purbalingga, Eureka Medika aksara, 2023).

<sup>11</sup> Dahlan Abdullah Meilyana Muhammad Syahrul Kahar Bunyamin, *Penerapan Metode Data Envelopment Analysis Untuk Pengukuran Efisiensi Kinerja, Seva Bumi Persada* (Medan, Sefa Bumi Persada, 2020).

Efisiensi tidak hanya sekedar menekan biaya serendah mungkin tetapi lebih dari itu, pengertiannya menyangkut pengelolaan hubungan input dan output, yaitu bagaimana mengelola faktor-faktor (input) sedemikian rupa sehingga dapat memberikan hasil (output) yang optimal. Suatu perusahaan akan dianggap lebih efisien apabila dengan tingkat input tertentu dapat menghasilkan output tertentu bisa menggunakan input lebih sedikit. Tingkat efisiensi suatu perusahaan pada dasarnya merupakan rasio output terhadap input (output to input ratio).<sup>12</sup>

Selain disebabkan oleh variabel input, ketidakefisienan juga ditemukan pada variabel output, seperti total pembiayaan dan pendapatan operasional. Pada beberapa Bank Umum Syariah yang belum mencapai efisiensi maksimal, jumlah pembiayaan yang disalurkan masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Salah satu faktor penyebabnya adalah penerapan prinsip kehati-hatian yang cukup ketat. Meskipun prinsip ini penting untuk menjaga kualitas pembiayaan, penerapannya yang terlalu konservatif justru dapat menghambat pencapaian target pembiayaan. Idealnya, prinsip kehati-

---

<sup>12</sup> R. Ramanathan, *An Introduction to Data Envelopment Analysis. A Tool For Performance Measurement*, (Sage Publication, New Delhi, Thousand Oaks, London, 2023)

hatian tetap dijalankan tanpa mengorbankan potensi penyaluran pembiayaan, dengan cara memperkuat sistem pengawasan untuk mencegah risiko pembiayaan bermasalah.<sup>13</sup>

Dalam beberapa periode kebelakang, bank syariah mengalami berbagai dinamika yang memengaruhi kinerja keuangannya, salah satunya adalah peningkatan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), salah satu yang menyebabkan pertumbuhan BOPO adalah meningkatnya biaya operasional yang terkait dengan digitalisasi.<sup>14</sup> Banyak bank syariah telah banyak berinvestasi dalam teknologi untuk meningkatkan operasional dan efisiensi, meskipun investasi ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi konsumen, biaya di muka yang tinggi dapat meningkatkan jumlah BOPO, terutama jika pendapatan dari layanan digital tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Pada tahun 2023, terjadinya peningkatan biaya operasional pada bank syariah karena beberapa faktor. Salah satu kejadian yang menyebabkan peningkatan biaya operasional adalah meningkatkan

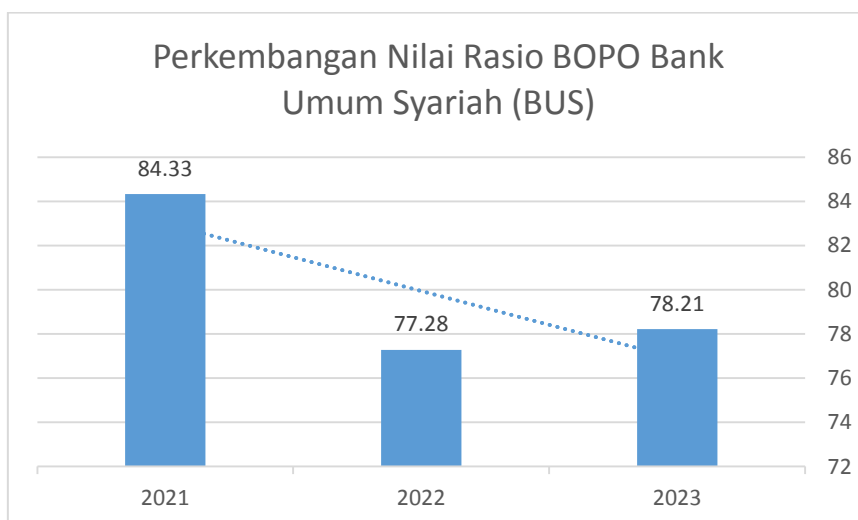
---

<sup>13</sup> Ardias Rifki Khaerun Cahya, “Efisiensi Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Menggunakan Data Envelopment Analysis,” *Economics Development Analysis Journal* 4, no. 3 (2017): 223–32.

<sup>14</sup> Retno Puji Astuti, “Pengaruh CAR, FDR, NPF, Dan BOPO Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 3213.

investasi di bidang infrastruktur dan informasi serta meningkatkan kemampuan digital bank. Selain itu, biaya operasional dan biaya lain yang terkait dengan ekspansi perbankan syariah juga meningkat. Di sisi lain, biaya perbankan syariah mungkin tidak cukup untuk menutupi biaya yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, seperti tingginya persaingan di pasar perbankan syariah dan rendahnya suku bunga yang digunakan bank syariah. Dampaknya, nilai rasio BOPO meningkat menjadi 78,21% pada desember 2023, yang tadinya di bulan maret nilai rasio BOPO hanya 75,78%.

**Grafik 1.2 Perkembangan nilai rasio BOPO Bank Umum Syariah**



Tingkat efisiensi praktik pembiayaan pada bank syariah di tahun 2023 menunjukkan tantangan yang signifikan, terutama

terkait dengan rasio BOPO yang meningkat. Meskipun bank syariah berusaha untuk meningkatkan layanan dan infrastruktur mereka, biaya operasional yang tinggi menjadi penghalang utama dalam mencapai efisiensi yang optimal. Peningkatan biaya untuk infrastruktur dan teknologi informasi, serta biaya pegawai, telah berkontribusi pada tingginya rasio BOPO. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah perlu mengelola biaya dengan lebih efektif untuk meningkatkan efisiensi.

Maka, untuk meningkatkan efisiensi praktik pembiayaan, bank syariah harus fokus pada pengelolaan biaya, peningkatan pendapatan, inovasi produk, dan manajemen risiko yang efektif. Hal ini akan membantu mereka untuk mencapai kinerja yang lebih baik dan meningkatkan nilai bagi nasabah serta pemangku kepentingan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tingkat efisiensi masih menjadi tantangan bagi Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia, dalam konteks ini kinerja

beberapa bank umum syariah di indonesia kurang efisien, terbukti dengan tingginya rasio BOPO.

2. Terjadi permasalahan bahwa secara rata-rata tingkat efisiensi perbankan syariah tidak mencapai 100% (tidak mengalami efisiensi) dan hanya sedikit periode yang mencapai 100%.

### **C. Batasan Masalah**

Penelitian ini akan difokuskan untuk menganalisis tingkat efisiensi praktik pembiayaan Bank Umum Syariah di indonesia. Ruang lingkup perbankan syariah yang akan diteliti mencakup beberapa dari Bank Umum Syariah (BUS) di indonesia yang memenuhi kriteria sebagai objek dalam penelitian ini.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis kinerja efisiensi pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2021-2023?
2. Bagaimana hasil perbandingan kinerja efisiensi Bank Umum Syariah (BUS) periode 2021-2023?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah kinerja efisiensi dari Bank Umum Syariah (BUS) 2021-2023.
2. Untuk mengetahui bagaimana hasil dari perbandingan kinerja efisiensi pada Bank Umum syariah (BUS) 2021-2023.

### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran akademik yang akan melakukan penelitian selanjutnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Bank Umum Syariah (BUS)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga keuangan terutama Bank Umum Syariah di Indonesia terhadap langkah dan kinerja Bank Umum Syariah dalam meningkatkan efisiensi untuk dijadikan pertimbangan dalam menghadapi persaingan global perbankan.

2. Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan khasanah ilmu pengetahuan di bidang ekonomi khususnya tentang

kinerja operasional pembiayaan bank dan juga menjadi bahan informasi untuk penelitian-penelitian berikutnya.

### 3. Bagi praktisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi pada praktisi perbankan khususnya tentang efisiensi pembiayaan bank sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan terkait peningkatan efisiensi operasional bank.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini ditulis menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

**Bab I**, Pendahuluan, yang Meliputi: Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Penelitian, Metode Penelitian, Hipotesis, Dan Sistematika Penulisan.

**Bab II**, Kajian Teoritis, dalam bab ini membahas mengenai landasan dari berbagai teori sebagai hasil dari studi Pustaka, teori yang diperleh akan dijadikan sebagai landasan pendukung tentang masalah yang diteliti.

**Bab III, Metodologi Penelitian.** Dalam bab ini, menjelaskan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumbernya.

**Bab IV, Pembahasan Hasil Penelitian.** Dalam bab ini menguraikan gambaran umum objek penelitian, pengujian hipotesis dan analisis data.

**Bab V, Kesimpulan dan Saran.**